

BERSEJARAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PERTAMA OTORITAS IBUKOTA NUSANTARA DI TITIK NOL NUSANTARA



Penyerahan LHP pertama OIKN ini untuk pertama kalinya dilakukan di Titik Nol, Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 7 Februari 2023. Foto/Istimewa

nasional.sindonews.com

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Sekretariat Negara menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terkait kegiatan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara tahun 2022. Penyerahan LHP pertama OIKN ini untuk pertama kalinya dilakukan di Titik Nol, Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 7 Februari 2023. "Ini sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, karena ini LHP pertama OIKN yang penyerahannya dilakukan pertama kalinya di Nusantara, ini bisa masuk rekor MURI karena yang pertama abadi," kata Kepala OIKN, Bambang Susantono dalam keterangannya, Sabtu (11/2/2023). "Selain itu, pelaksanaan penyerahannya juga pertama kali dilakukan di ruang terbuka, bahkan ini di titik nol ini sebuah sejarah baru untuk Nusantara dan Indonesia," tambahnya.

Bambang mengucapkan terima kasih kepada BPK karena telah melakukan pemeriksaan meski belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Tapi ini justru luar biasa, karena saat ini kami memiliki landasan, juga memiliki rekomendasi, memiliki hal-hal yang harus kita lakukan agar OIKN dari awal kami benar-benar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," jelas Bambang. Bambang mengungkapnya, OIKN ingin agar memiliki standar ESG internasional, yakni Environmental, Social, and Governance. Manakala ada kasus di governance yang membuat 'cacat', maka ke depannya akan sulit bagi OIKN untuk mengembangkan diri dan membangun. "Utamanya mengakses semua

pendanaan dari dunia. Misalnya, lima tahun lagi kami akan membuat obligasi blue bond, atau green bond, atau SDG bond. Untuk itu kami perlu mengakses pasar internasional," ungkap Bambang. Menurut Bambang, untuk bisa mewujudkan rencana tersebut dimulai dari ESG yang dilakukan secara benar sesuai dengan standar internasional. "Bila ESG-nya kurang baik, jangan berharap kita mengeluarkan obligasi yang diakui secara internasional," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.sindonews.com/read/1020259/15/bersejarah-bpk-serahkan-lhp-pertama-otoritas-ikn-di-titik-nol-nusantara-1676109771>, Bersejarah, BPK Serahkan LHP Pertama Otoritas IKN di Titik Nol Nusantara, Sabtu 11 Februari 2023
2. <https://regional.kontan.co.id/news/bpk-serahkan-lhp-pertama-otorita-ikn-di-titik-nol-nusantara>, BPK Serahkan LHP Pertama Otorita IKN di Titik Nol Nusantara, Minggu 12 Februari 2023

Catatan:

1. Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 6 ayat 1: BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Undang-Undang 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Pasal 1 ayat 1: Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 1 ayat 2: Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.